

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pembangunan suatu negara indonesia harus mampu meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Namun kenyataannya pembangunan saat ini secara menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan pengelolaan kewenangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional khususnya dalam hal meningkatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerah serta melakukan melakukan alokasi untuk memprioritaskan pembangunan di daerahnya secara mandiri serta diharapkan dapat lebih meratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal yang dapat mengembangkan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dilakukan atas belanja modal. Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan

tersebut dalam bentuk alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Meskipun realisasi pembangunan telah dinikmati hampir seluruh masyarakat, namun hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan diantara di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (perkapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran.

Dalam rangka mewujudkan daerah dengan kualitas manusianya yang tinggi, pemerintah dapat menggunakan APBD-nya untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor tersebut (Maryani, 2012). Secara spesifik, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui belanja pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM misalnya yang tercermin pada realisasi belanja daerah untuk untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan dalam bentuk alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Ishak, 2016). Johana (2011) menyatakan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan dapat mempengaruhi kemiskinan jika belanja tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap Indeks Pembangunan Manusia ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu Zebua (2014), Supadmi (2016). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas. Peneliti menambahkan variabel belanja daerah dari penelitian Supadmi (2016) dikarenakan penelitian sebelumnya belanja daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah belanja daerah jika dilihat dari belanja langsung, jenis kelompok belanja langsung, belanja tidak langsung maupun jenis kelompok tidak langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Laporan indeks pembangunan manusia jika dilihat dari badan pusat statistik (BPS) di Jawa Timur pada tahun 2017 mengalami kemajuan selama periode 2011- 2017. Dari 66,06 (2011) meningkat menjadi 70,27 (2017) atau selama periode tersebut tumbuh 6,4 persen. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2011-2017 sebesar 1,04 persen per tahun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi itu ditunjukkan dari meningkatkan predikat IPM Jawa Timur pada tahun 2017 menjadi IPM berkategori “tinggi” untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dari tahun 2010 hingga tahun 2016 Jawa Timur masih berkategori “sedang”. Walaupun demikian, Pemerintah Jawa Timur tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya, karena masih ada satu wilayah di Jawa Timur (Sampang) yang berkategori IPM “rendah”. Jika program pembangunan manusia disinergikan dengan baik, diperkirakan pada tahun mendatang Sampang akan masuk IPM berkategori “sedang”.

Dilihat dari pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 81,07, yang sebelumnya berada di posisi kedua. Surabaya bersama Kota Malang dan Kota Madiun merupakan daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”. Daerah dengan kategori IPM “tinggi” sebanyak 16 kabupaten/ kota, sedangkan yang berkategori “sedang” sebanyak 18 kabupaten/kota. Sampang satu-satunya wilayah dengan IPM berkategori “rendah” atau mempunyai IPM sebesar 59,90. Kota Surabaya tercatat mempunyai UHH terbaik sebesar 73,88 tahun. Sarana dan prasarana kesehatan di Surabaya relatif lengkap, dan masyarakatnya dengan mudah memanfaatkan akses sarana dan prasarana kesehatan. Di samping itu, kesadaran masyarakat Surabaya untuk berpola hidup sehat cukup tinggi, sehingga mendukung meningkatnya usia harapan hidup. UHH terendah masih tercatat di Bondowoso atau sebesar 66,04 tahun. Walaupun demikian capaian UHH tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,15 tahun dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Bondowoso juga semakin membaik. Kota Malang mempunyai HLS tertinggi sebesar 15,39 tahun, dan terendah tercatat di Sampang sebesar 11,38 tahun, sedangkan RLS tertinggi tercatat di Kota Madiun sebesar 11,10 tahun dan yang terendah masih dipegang Sampang dengan RLS sebesar 4,12 tahun. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan tahun 2017 tertinggi tercatat di Surabaya atau sebesar Rp. 16,7 juta, diikuti Kota Malang dan Kota Madiun masing-masing Rp. 15,9 juta dan Rp. 15,4 juta. Sementara, terendah tercatat di Sumenep atau sebesar Rp. 8,3 juta.

Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang

kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia (Sahrah, 2014). Mencermati alokasi pengeluaran pemerintah terhadap akses publik terjadi kondisi yang cukup memprihatinkan. Hal tersebut tampak dari masih relatif tingginya alokasi anggaran belanja rutin dibanding anggaran belanja pembangunan, baik dalam skala nasional maupun regional. Khusus mengenai alokasi pengeluaran pendidikan, rencana alokasi 20% untuk anggaran pendidikan masih jauh dari realita (Suparto, 2005). Perbedaan-perbedaan hasil penelitian data penulis dirasa perlu untuk dilakukan pengujian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian Supadmi (2016) yang menguji tentang “Pengaruh Alokasi Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali ”. Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah Menggunakan data realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang diukur berdasarkan belanja langsung, jenis kelompok dari belanja langsung, belanja tidak langsung, maupun jenis kelompok dari belanja tidak langsung yang diperoleh dari kementerian keuangan (KEMENKEU), Menggunakan sampel Kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2015-2017. Sehubungan hal tersebut judul penelitian adalah “ PENGARUH KOMPONEN ALOKASI BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA “ pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur (periode 2015-2017).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah belanja langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia?
2. Apakah jenis belanja dari kelompok belanja langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia?
3. Apakah belanja tidak langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia ?
4. Apakah jenis belanja dari kelompok belanja tidak langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia?

1.3 Tujuan Peneliti

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah belanja belanja langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
2. Untuk mengetahui apakah jenis belanja dari kelompok belanja berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
3. Untuk mengetahui apakah belanja tidak langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
4. Untuk mengetahui apakah jenis belanja dari kelompok belanja tidak langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademis mengenai pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur dalam memahami bagaimana pengaruh belanja daerah mempengaruhi indeks pembangunan manusia.
3. Bagi peneliti lain, untuk dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam peneliti di sector public serta sebagai referensi tambahan bagi penelitian yang berkaitan agar dapat mengembangkan penelitian menjadi lebih komprehensif dan real, dan juga sebagai bahan rujukan oleh peneliti lain jika hendak menulis dan melakukan penelitian yang serupa.

1.5 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada pengaruh belanja daerah yang di ukur berdasarkan belanja langsung, jenis kelompok dari belanja langsung, belanja tidak langsung, maupun jenis kelompok dari belanja tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.